

BAB II

KEAMANAN MARITIM ASIA PASIFIK DAN KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA

Penulis pada bagian bab ini, penulis akan membagi penjelasan dalam tiga bagian, yaitu: *Pertama*, penulis terkait keamanan maritim Indonesia di Asia Pasifik. *Kedua*, terkait keamanan maritim Amerika Serikat di Asia Pasifik. *Ketiga*, terkait adanya kebijakan poros maritim dunia. Sehingga penulis akan memaparkan terkait dinamika keamanan maritim Indonesia dan keamanan maritim Amerika Serikat yang terjadi di Asia Pasifik. Kemudian selanjutnya dengan adanya hal tersebut, penulis akan memaparkan terkait kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia pada masa pemerintahan Joko Widodo, karena hal ini agar dapat mengetahui dengan jelas bagaimana kebijakan poros maritim dunia yang menjadi visi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain itu, pada bagian ini juga penulis akan memaparkan terkait politik luar negeri Indonesia melalui visi poros maritim dunia dalam menanggapi dinamika keamanan maritim di Asia Pasifik.

Dengan adanya perkembangan yang signifikan di Asia Pasifik telah menimbulkan ancaman keamanan maritim. Hal ini disebabkan karena seiring berjalannya waktu, laut telah berkembang menjadi lebih strategis dan menimbulkan ancaman keamanan maritim ke arah yang lebih kompleks. Sehingga kawasan ini tidak lepas dari berbagai dinamika yang terjadi dan sering dihadapkan pada isu-isu keamanan tradisional dan non-tradisional, seperti yang ada pada tabel berikut:

ISU-ISU TRADISIONAL	ISU-ISU NON-TRADISIONAL
1. Ketegangan yang terjadi di wilayah perbatasan beberapa negara di Asia Pasifik. 2. Sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan.	1. Adanya penyelundupan senjata. 2. Adanya penyelundupan manusia. 3. Adanya penyelundupan narkoba. 4. Perompakan di laut. 5. <i>Illegal fishing</i> . 6. Separatisme. 7. Terorisme. 8. Pencurian kekayaan alam.

Tabel 2.1. Dinamika keamanan di Asia Pasifik (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, 2015, p. 6).

Isu-isu tersebut merupakan isu maritim yang menjadikan kawasan ini semakin krusial untuk terjadinya konflik. Dinamika yang terjadi di kawasan ini dapat mengancam kedaulatan negara-negaranya. Apalagi kawasan ini juga telah menjadi kawasan yang mempertemukan negara-negara yang memiliki kekuatan besar, diantaranya Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Rusia (Rachmat, 2017, p. 132). Sehingga dengan berbagai dinamika yang terjadi membuat stabilitas keamanan maritim di Asia Pasifik menjadi perhatian penting bagi negara-negara yang memiliki kepentingan terhadap kawasan ini untuk tetap dijaga agar dapat terhindar dari konflik. Oleh karena itu, Asia Pasifik telah menjadi sebuah kawasan yang memiliki berbagai tantangan dan peluang untuk meningkatkan kerja sama antar negara (Firdaus, 2015). Sehingga Asia Pasifik sering dihadapkan pada situasi yang menyebabkan keamanan maritim kawasan ini menjadi bersinggungan terhadap kepentingan yang dimiliki oleh setiap negara-negaranya.

2.1 Keamanan Maritim Indonesia di Asia Pasifik

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan memiliki laut yang luas dan telah lama menjadi jalur perdagangan internasional yang dilalui oleh negara-negara di dunia. Sejarah panjang yang dimiliki Indonesia dalam meraih kemajuan di dunia maritim menjadi sebuah tolak ukur bagi pemerintah Indonesia untuk terus memajukan kemaritiman yang dimiliki. Di sisi lain, perairan Indonesia sangat penting bagi negara lain karena memiliki nilai politik dan strategi keamanan (Rustam, 2016, p. 4). Sehingga seiring berjalannya waktu, menyebabkan terjadinya perkembangan terhadap peran laut yang mana laut telah menjadi penting bagi kemajuan suatu negara. Tak terkecuali Indonesia dewasa ini telah berusaha memanfaatkan letak geografisnya yang strategis dengan memanfaatkan laut.

Dengan luasnya laut yang dimiliki telah menjadi salah satu sumber kepentingan Indonesia dalam mempertahankan dan menjaga keamanan maritim dari kondisi yang dapat mengancam, seperti ancaman pelanggaran wilayah, eksploitasi dan eksplorasi ilegal terhadap potensi kekayaan laut Indonesia, pelanggaran navigasi keamanan, serta ancaman yang berasal dari luar negeri (Kartika, 2014, p. 151). Oleh karena itu, masalah-masalah keamanan maritim sangat sering terjadi melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Sehingga adanya pelanggaran dan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia tersebut memunculkan respon dari pemerintah Indonesia melalui kebijakan poros maritim dunia (Paskarina, 2016, pp. 4-5).

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Asia Pasifik, telah adanya pertarungan antar negara-negara besar terhadap kepentingan-kepentingan dalam memperebutkan sumber daya yang dimiliki negara-negara di kawasan ini. Oleh karena itu, kebijakan poros maritim dunia dibuat karena terjadinya perubahan ekonomi dan konstelasi kekuasaan pada ranah global (Paskarina, 2016, p. 6). Sehingga peran aktif Indonesia dalam percaturan politik global menjadikan Indonesia terlibat dalam menjaga keamanan maritim di Asia Pasifik karena tidak terlepas dari kepentingan nasional yang dimiliki untuk tetap dijaga stabilitasnya agar dapat terwujud. Di mana negara yang memiliki laut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang cukup memadai dalam menjaga keamanan maritim agar segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan maritim dapat diatasi (Edrian, 2017, p. 20). Sama halnya dengan Indonesia yang harus memiliki kekuatan dan kemampuan baik pada militer maupun pada maritimnya dalam membangun dan menjaga keamanan maritim.

Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menunjukkan peran aktif dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di Asia Pasifik agar dapat terhindar dari konflik yang akan terjadi. Kemudian hal ini tidak terlepas dari posisi Indonesia yang strategis dan telah menjadi jalur bagi perdagangan internasional serta status yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha menjaga keamanan maritim dan melindungi kedaulatan nasionalnya. Berbagai permasalahan keamanan maritim yang dihadapi Indonesia yaitu seperti permasalahan

perbatasan laut, *illegal fishing*, terorisme, perompakan, *human trafficking*, kecelakaan laut, dan perdagangan narkoba.

Oleh karena itu, ancaman melalui laut menjadi permasalahan yang penting pada sektor keamanan maritim Indonesia. Dengan begitu, dilihat dari perspektif keamanan, pemerintah Indonesia terus melakukan penguatan kekuatan pertahanan dan keamanan agar apa yang telah menjadi kepentingan nasional dapat tercapai dan dapat mencegah dari ancaman yang datang. Sehingga untuk mewujudkan keamanan tersebut, maka Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terus melakukan peningkatan terhadap kekuatan maritim dan militer yang dimiliki. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menunjukkan perannya sebagai negara maritim kepada dunia internasional (Rustam, 2016, p. 6). Sebab Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadi sebuah keharusan dalam memiliki kekuatan maritim dan militernya agar keamanan dan stabilitas maritim Indonesia menjadi terjaga dari ancaman yang datang.

Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terus melakukan pembenahan pada sektor maritim. Adanya pembenahan tersebut merupakan bentuk keseriusan dari pemerintah Indonesia dalam melindungi maritimnya. Hal ini tidak lain karena keamanan Maritim dapat diwujudkan dengan menjaga wilayah laut karena potensi dan sumber daya yang dimiliki juga banyak berasal dari laut (Keliat, 2009, p. 115). Sehingga Indonesia yang merupakan negara kepulauan telah membuat kebijakan dalam menangani berbagai kasus keamanan maritim. Di mana dalam kebijakan ini, pemerintah Indonesia memiliki instansi yang terkait. Sehingga di berbagai instansi bidang

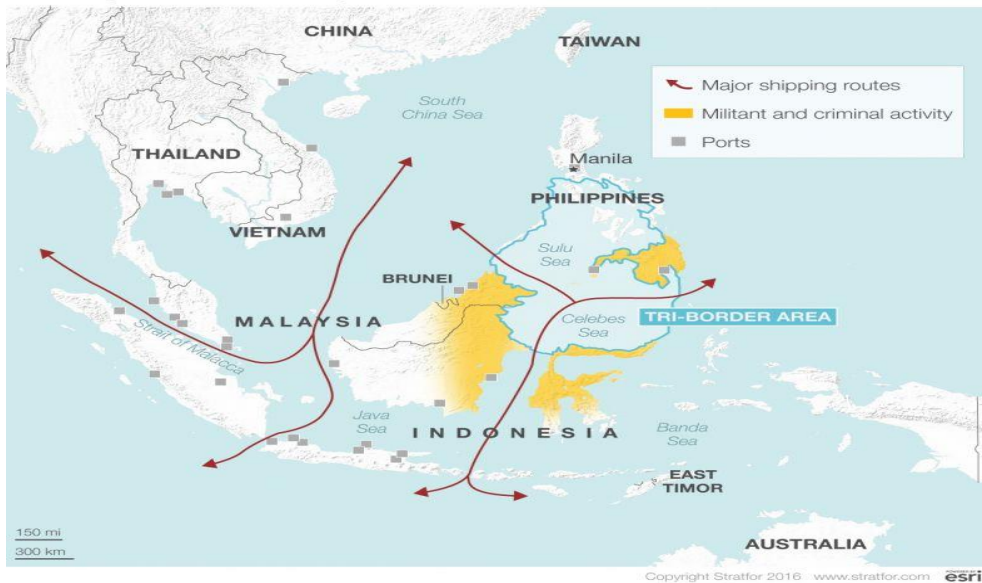
pemerintahan tersebut memiliki peranan masing-masing yang disesuaikan dengan tugasnya.

Wilayah Indonesia yang berada di Asia Pasifik dan telah menjadi jalur perlintasan internasional sering terganggu keamanan maritimnya. Sebab dengan wilayah lautnya yang luas bukan tidak mungkin segala kejahatan melalui laut dapat mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia. Indonesia terus berusaha untuk menempatkan diri sebagai penyeimbang di antara kekuatan besar dunia (Yakti & Susanto, 2017, p. 7). Oleh karena itu, Indonesia terus melindungi dan mengamankan kondisi perairan wilayahnya dari segala bentuk ancaman. Apalagi Asia Pasifik telah menjadi tempat yang penting bagi Indonesia untuk dijaga keamanan maritim kawasan ini. Hal ini tidak lain merupakan salah satu kawasan bagi Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya yaitu untuk menjadi sebagai poros maritim dunia.

Secara geopolitik, Indonesia yang berada di Asia Pasifik menjadi salah satu kunci dari stabilitas keamanan maritim kawasan ini. Namun, keamanan maritim Indonesia yang menjadi barometer stabilitas keamanan Asia Pasifik juga tidak luput dari pengaruh internal dan eksternal dalam menghadapi berbagai isu keamanan maritim yang terjadi. Di bawah ini merupakan gambar ancaman keamanan melalui jalur pelayaran di tiga daerah Indonesia, yaitu:

Security Threats and Shipping Lanes in the Tri-Border Area

Trade in the tri-border area often involves supertankers that are unable to use the narrow, shallow Strait of Malacca. However, weak governance and security gaps threaten trade flows and fishing activities in the waterway.



Gambar 2.1.1. Ancaman keamanan dan jalur pelayaran di tiga daerah perbatasan Indonesia (Stratfor, 2016).

Dengan adanya gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa wilayah laut Indonesia merupakan jalur bagi perdagangan internasional. Sehingga dengan menjadi jalur perdagangan internasional tersebut, maka ancaman keamanan maritim Indonesia sangat tinggi. Namun secara signifikan, jumlah perdagangan internasional yang melewati tiga jalur tersebut lebih rendah dibandingkan dengan jalur yang melewati Selat Malaka (Stratfor, 2016). Sebab Selat Malaka merupakan jalur perdagangan di Asia Pasifik yang dapat menghubungkan dengan cepat ke beberapa negara.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar menganggap laut merupakan unsur negara yang harus mampu dijaga dan dimanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatannya dalam menjadi poros maritim dunia. Namun, wilayah maritim Indonesia telah

menjadi sebuah arena ancaman terhadap keamanan laut yang sering terjadi (Dinarto, 2016, p. 5). Indonesia dapat dikatakan belum mampu menjaga lautnya secara maksimal. Oleh karena itu, Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu melakukan reformasi tata kelola terhadap keamanan maritim untuk menjaga stabilitas keamanan maritimnya (Dinarto, 2016, p. 13).

Dalam menjadikan laut sebagai sumber kekuatan suatu negara, maka pentingnya suatu kebijakan terkait keamanan maritim. Keamanan maritim telah mengalami berbagai perkembangan pada lingkungan yang strategis dengan berbagai dinamika yang terjadi. Apalagi berbagai ancaman keamanan melalui perairan Indonesia juga telah berkembang ke lingkungan yang strategis (Madjid, 2015, p. 149). Sehingga hal tersebut akan berdampak pada stabilitas keamanan maritim di Asia Pasifik. Selain itu, adanya ancaman keamanan maritim telah menjadi isu yang sangat penting antar negara karena kejahatan sudah banyak terjadi melalui laut (Karnaedi, 2017). Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan ancaman keamanan maritim tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo berusaha mengangkat kembali Indonesia sebagai negara maritim melalui kebijakan poros maritim dunia. Di mana dalam kebijakan ini, terdapat aktor yang dapat memainkan perannya agar menghasilkan sebuah keputusan (Madjid, 2015, p. 148). Sebab berbagai dinamika ancaman keamanan maritim yang terjadi di Asia Pasifik telah membuat pemerintah Indonesia terlibat dalam menanganinya. Sehingga strategi keamanan maritim yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu dengan membangun dan memperkuat hubungan kerja sama keamanan maritim.

Kerjasama keamanan maritim ini merupakan bagian dari kerangka kerjasama maritim yang telah menjadi kebijakan dari pemerintah Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara *middle power* yang memiliki keterbatasan yang ada. Selain itu, di abad 21 ini Asia Pasifik telah menghadapi berbagai isu keamanan, baik itu isu keamanan tradisional maupun isu non-tradisional (Purnama, 2017, p. 88). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memanfaatkan hubungan kerjasama keamanan maritim dengan Amerika Serikat sebagai strategi dalam menciptakan stabilitas keamanan maritim di Asia Pasifik. Bahkan Indonesia juga memanfaatkan *rebalancing strategy* dari Amerika Serikat (Koran Sindo, 2017). Di mana Amerika Serikat dalam keterlibatannya di Asia Pasifik melakukan penguatan militernya dalam menghadapi berbagai ancaman (Rachmat, 2017, pp. 146-147).

Dengan adanya strategi yang dimiliki, pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan penguatan kerjasama keamanan maritim dengan Amerika Serikat untuk menjadi jalan dalam mencapai kepentingan yang dimiliki. Indonesia dapat menjadi sebagai insiator dalam membangun hubungan kerjasama keamanan maritim. Sehingga Indonesia dapat mengatasi segala permasalahan atau ancaman keamanan maritim dengan kerjasama yang dilakukan. Di mana dengan usaha yang dilakukan tersebut dapat meningkatkan citra Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Indonesia juga dapat memperoleh manfaat dalam memerangi segala ancaman keamanan maritim yang ada. Namun, dalam menjalankan strategi keamanan maritim ini, perlu adanya kehati-hatian dari pemerintah Indonesia karena akan dapat merugikan Indonesia itu sendiri.

2.2 Keamanan Maritim Amerika Serikat di Asia Pasifik

Amerika Serikat merupakan negara yang terletak di bagian timur Asia Pasifik. Hingga saat ini Amerika Serikat telah dikenal sebagai negara *super power*. Selain itu, Amerika Serikat juga telah menjadi negara dengan memiliki kemaritiman yang maju. Amerika Serikat seiring perkembangannya, setelah Perang Dingin tidak henti-hentinya mengembangkan teknologi di berbagai bidang (Hussein, 2013, pp. 85-86). Sehingga sampai saat ini Amerika Serikat telah mendominasi perpolitikan global dengan menggunakan kemampuannya sebagai negara yang maju. Namun, dewasa ini telah terjadi suatu perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Di mana perkembangan yang paling signifikan terjadi terhadap negara-negara di Asia Pasifik.

Seiring berjalannya waktu, sering terjadi persaingan kepentingan yang dapat menyebabkan konflik antar negara. Bahkan dalam hal ini sering juga konflik yang disebabkan karena adanya aktor-aktor non-negara yang memiliki perannya masing-masing. Oleh karena itu, Amerika Serikat sebagai negara yang juga memiliki kepentingan di Asia Pasifik ikut terlibat dalam menjaga stabilitas maritim, khususnya stabilitas keamanan maritim di kawasan ini. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi karena Amerika Serikat merupakan negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Sehingga Amerika Serikat berani mengambil peran dalam persaingan di Asia Pasifik.

Amerika Serikat telah lama menjadi negara yang menghegemoni dunia dan selalu menunjukkan perilakunya yang signifikan terhadap stabilitas

keamanan maritim di Asia Pasifik. Di sisi lain, suatu negara akan menerima besar kecil ancaman dapat dipengaruhi oleh letak atau posisi geografis negara tersebut (Planifolia, 2017, p. 7). Sehingga Amerika Serikat juga semakin melakukan modernisasi kekuatan militernya demi mempertahankan keamanan dan kedaulatan serta kepentingan nasionalnya di Asia Pasifik. Di mana salah satu bentuk usaha Amerika Serikat tersebut yaitu telah aktif dalam kebijakan luar negerinya di kawasan ini, seperti misalnya memutuskan untuk membangun pangkalan militer di beberapa negara Asia Pasifik. Namun, hal ini tidak lain sebagai strategi Amerika Serikat dalam menyeimbangkan kekuatannya di Asia Pasifik terhadap negara-negara yang memiliki kemampuan militer yang dapat mengganggu hegemoninya. Apalagi Amerika Serikat melihat kekuatan Tiongkok seperti sekarang ini telah mulai menunjukkan hegemoninya sebagai *new emerging power* di Asia Pasifik (Ikenberry & Mastanduno, 2003, p. 8). Berikut adalah contoh keterlibatan Amerika Serikat dengan melakukan latihan militer dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di Asia Pasifik:

Exercise	Description	Non-U.S. Participants
Cobra Gold	Annual military exercise	Thailand, Singapore, Japan, Republic of Korea, Indonesia
Cooperation Afloat Readiness and Training	Annual series of bilateral naval exercises	Brunei, Cambodia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand
Malabar	Annual bilateral exercise and Indian navies	India and, periodically, Australia, Japan, and Singapore
Rim of the Pacific (RIMPAC)	Biennial maritime training exercise that included interdiction exercises in 2010 (“Combined Agility, Synergy, Support”)	Australia, India (observer), Indonesia, Japan, Republic of Korea, Malaysia, Singapore, Thailand, and others (2010)
Southeast Asian Cooperation Against Terrorism	Annual weeklong at-sea exercise focusing on interception	Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore,

Tabel 2.2.1. Latihan Maritim Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik (Henry, Osowski, Chalk, & Bartis, 2012, p. 22).

Amerika Serikat terus mempererat hubungan dengan negara mitra kerja samanya di Asia Pasifik. Di mana hal ini tidak lain karena Amerika Serikat terus melakukan berbagai usaha dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan ini. Misalnya seperti tabel di atas merupakan salah satu bentuk usaha Amerika Serikat dalam menjaga kepentingan nasionalnya di kawasan ini.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Amerika Serikat memiliki kemaritiman yang maju, di mana dalam mengurus kemaritimannya tersebut memiliki badan pertahanan dan keamanan. Badan pertahanan dan keamanan ini terdiri dari tiga, yaitu *US Navy*, *US Marine Corps*, dan *US Guard*. Sehingga dengan memiliki tiga badan ini, keamanan maritim Amerika Serikat dapat dikelola dengan baik. Hal ini merupakan bentuk keseriusan Amerika Serikat dalam mengelola dan menjaga wilayah maritimnya. Oleh karena itu, stabilitas

keamanan maritim yang ada di Asia Pasifik perlu ditingkatkan guna tetap stabilnya kawasan ini.

Keamanan maritim di Asia Pasifik telah membuat Amerika Serikat dihadapkan dengan berbagai tantangan yang ada. Sehingga Amerika Serikat berusaha melakukan penyeimbangan kekuatan di Asia Pasifik. Bagi Amerika Serikat, keamanan maritim regional, terutama di Asia Pasifik telah menjadi prioritas utama (Fiorentini, 2017, p. 11). Di mana bagi Amerika Serikat, wilayah laut kawasan Asia Pasifik merupakan wilayah yang sangat rawan untuk terjadinya konflik di dunia. Sehingga Amerika Serikat yang memiliki kepentingan terhadap kawasan ini telah melakukan berbagai usaha dalam memerangi ancaman keamanan maritim yang terjadi.

Dalam menjaga keamanan maritim di Asia Pasifik, Amerika Serikat telah melakukan penguatan kerja sama dengan negara-negara di kawasan ini. Di mana Amerika Serikat juga telah menghadirkan angkatan lautnya di beberapa negara di kawasan ini. Hal tersebut merupakan salah satu komitmen yang ditunjukkan Amerika Serikat kepada negara-negara sekutunya dalam menjaga keamanan maritim di Asia Pasifik. Di sisi lain, penguatan kerja sama yang dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan suatu usaha dalam mengatasi ketegangan yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan, terutama negara-negara yang terlibat ketegangan di wilayah ini (Republika, Amerika Serikat Perkuat Kerja Sama Maritim, 2014). Selain itu, Amerika Serikat juga ikut terlibat dalam mengatasi berbagai isu keamanan maritim di kawasan ini. Namun, Amerika Serikat tidak hanya melakukan penguatan kerja sama dengan negara-negara tersebut, tapi juga terus melakukan penguatan kerja sama di bidang kemaritiman

dengan Indonesia yang merupakan negara mitra kerja sama di Asia Pasifik. Salah satu bukti adanya kerja sama yang terus berlanjut antara Amerika Serikat dan Indonesia yaitu dibuktikan dengan adanya seminar internasional yang berjudul *2nd Maritime Defense in Littoral Environment* yang membahas terkait penanganan terorisme maritim dan pemberantasan *IUU fishing* (Setiawan, 2017). Hal ini dikarenakan Amerika Serikat memiliki kebijakan terkait maritim yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Oleh karena itu, Amerika Serikat terus melibatkan diri dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di Asia Pasifik untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Amerika Serikat dalam strategi keamanan maritimnya di Asia Pasifik, melalui pelaksanaannya berusaha menunjukkan kekuatannya dengan melakukan kerja sama yang terus dibangun dan ditingkatkan. Di mana sekutu Amerika Serikat telah meliputi mayoritas negara-negara di Asia Pasifik. Amerika Serikat memiliki peran penting di Asia Pasifik yang mana terdapat kerja sama yang erat dengan Australia, Selandia Baru, Jepang, Kanada, dan Korea Selatan (Djelantik, 2015, p. 35). Selain itu, dalam membangun hubungan kerja sama di Asia Pasifik, Amerika Serikat memiliki hubungan yang strategis dengan Filipina, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia, serta hubungan khusus dengan Taiwan.

Amerika Serikat yang sebelumnya fokus ke Timur Tengah telah beralih ke Asia Pasifik. Adanya peralihan yang dilakukan tersebut tidak lain karena Asia Pasifik sekarang ini bagi Amerika Serikat merupakan kawasan yang paling penting untuk masa depan (VOA Indonesia, 2016). Sehingga pasukan militer Amerika Serikat yang sebelumnya fokus ke Timur Tengah telah berpindah ke

Asia Pasifik untuk menjaga keamanan kawasan ini. Berikut adalah penyebab pemerintah Amerika Serikat dalam memindahkan pasukan militer ke kawasan Asia Pasifik (Vaughn, 2007, pp. 2-6), yaitu:

1. Untuk menyeimbangkan kekuatan terhadap kenaikan militer Tiongkok.
2. Membantu Aliansi pertahanan Amerika Serikat di Asia Pasifik dalam melawan ancaman.
3. Ikut terlibat dalam penyelesaian konflik di Asia Pasifik, seperti konflik Semenanjung Korea, sengketa Senkaku, dan sengketa Laut Tiongkok Selatan.
4. Meningkatkan perlombaan senjata antar negara-negara di Asia Pasifik.

Dengan begitu Amerika Serikat memiliki peran dalam menjaga keamanan maritim di Asia Pasifik. Apalagi keamanan maritim kawasan ini telah berkembang ke arah yang lebih kompleks. Oleh karena itu, Amerika Serikat ikut terlibat secara aktif dalam menjaga keamanan dan perdamaian dengan terus mengembangkan hubungan kerja sama keamanan dan pertahanan dengan negara-negara Asia Pasifik (Huyen, 2015). Apalagi setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet telah menjadikan Amerika Serikat sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia hingga saat ini (Hussein, 2013, p. 87). Hal ini mengingat peran Amerika Serikat melalui kebijakan luar negerinya yang terus menjadi kekuatan besar di Asia Pasifik bahkan dunia. Selain itu, negara-negara di Asia Pasifik melihat Amerika Serikat sebagai negara yang kuat dan telah lama memiliki peran yang penting di kawasan ini. Sehingga keberadaan Amerika Serikat di Asia Pasifik telah membuat banyak negara di kawasan ini memiliki ketergantungan karena adanya jaminan

keamanan (Rachmat, 2017, p. 138). Di mana Amerika Serikat dalam menjaga keamanan, khususnya keamanan maritim kawasan ini telah menempatkan pangkalan militer di beberapa negara di kawasan ini. Berikut adalah peta keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di beberapa negara kawasan Asia Pasifik, yaitu:



Gambar 2.2.1. Significant U.S Military Elements in the PACOM AOR (Bower, et al., 2016, pp. 32-33).

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pangkalan militer Amerika Serikat telah terkonsentrasi di Asia Pasifik. Amerika Serikat telah membangun konstruksi militer di kawasan ini. Sehingga dengan keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Asia Pasifik dimaksud untuk menjaga ketertiban dan keamanan maritim kawasan ini. Sebab adanya berbagai dinamika keamanan maritim yang terjadi di Asia Pasifik telah menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang memiliki potensi yang bagus untuk masa depan. Tidak terkecuali Amerika Serikat yang menganggap kawasan ini sebagai kawasan yang penting bagi masa depannya. Di mana Amerika Serikat terus

meningkatkan hubungan kerja sama keamanan dengan aliansinya (Planifolia, 2017, p. 9). Asia Pasifik bagi Amerika Serikat menjadi sebuah kawasan yang perlu adanya pengamanan terhadap berbagai ancaman keamanan maritim. Oleh karena itu, ketika adanya pengamanan terhadap kawasan ini akan dapat menjaga wilayah Amerika Serikat itu sendiri.

Di sisi lain, Hal ini dikarenakan terus terjadinya peningkatan dan modernisasi yang dilakukan negara-negara di Asia Pasifik. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, terus terjadi perkembangan dinamika keamanan maritim yang semakin kompleks di kawasan ini. Bahkan Amerika Serikat menjadikan wilayah Australia sebagai pangkalan *drone* yang digunakan untuk pengintaian (Nainggolan, 2013, p. 274). Sehingga sektor keamanan maritim menjadi penting dalam hubungan kerja sama antara Amerika Serikat dengan aliansinya karena dapat memiliki dampak yang baik terhadap sektor lain ketika keamanan maritim kawasan ini dapat dijaga.

1.3 Implementasi Kebijakan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Terhadap Dinamika Keamanan Maritim di Asia Pasifik

Dewasa ini, Indonesia yang merupakan negara kepulauan telah menjadi sebuah negara yang memiliki posisi sangat strategis. Dengan adanya perkembangan yang signifikan terhadap percaturan politik global telah membuat Indonesia harus ikut terlibat dengan memiliki peran dalam hal tersebut. Dilihat dari perkembangannya, Indonesia yang merupakan salah satu negara di Asia Pasifik harus mampu bersaing dengan negara lainnya di kawasan ini. Sehingga Indonesia pada pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat

kebijakan melalui visinya yaitu poros maritim dunia. Kebijakan ini terus-menerus diimplementasi secara berkelanjutan demi tercapainya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Misalnya seperti kerja sama keamanan maritim dalam menangani terkait ancaman terorisme dan pemberantasan *Illegal, Unreported, dan Unregulated* (IUU) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat (Hariyanto, 2017).

Sebelum lebih jauh membahas terkait implementasi kebijakan poros maritim dunia terhadap dinamika keamanan di Asia Pasifik, perlu terlebih dahulu untuk mengetahui kebijakan poros maritim dunia Presiden Joko Widodo. Kebijakan poros maritim dunia merupakan visi yang dimiliki Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Poros maritim dunia ini ada karena untuk membawa kembali kejayaan maritim yang pernah ada. Melalui kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014), dikatakan kebijakan ini merupakan gagasan yang telah dirancang dengan memiliki lima pilar utama, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia.
2. Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.
3. Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
4. Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah,

perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.

5. Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

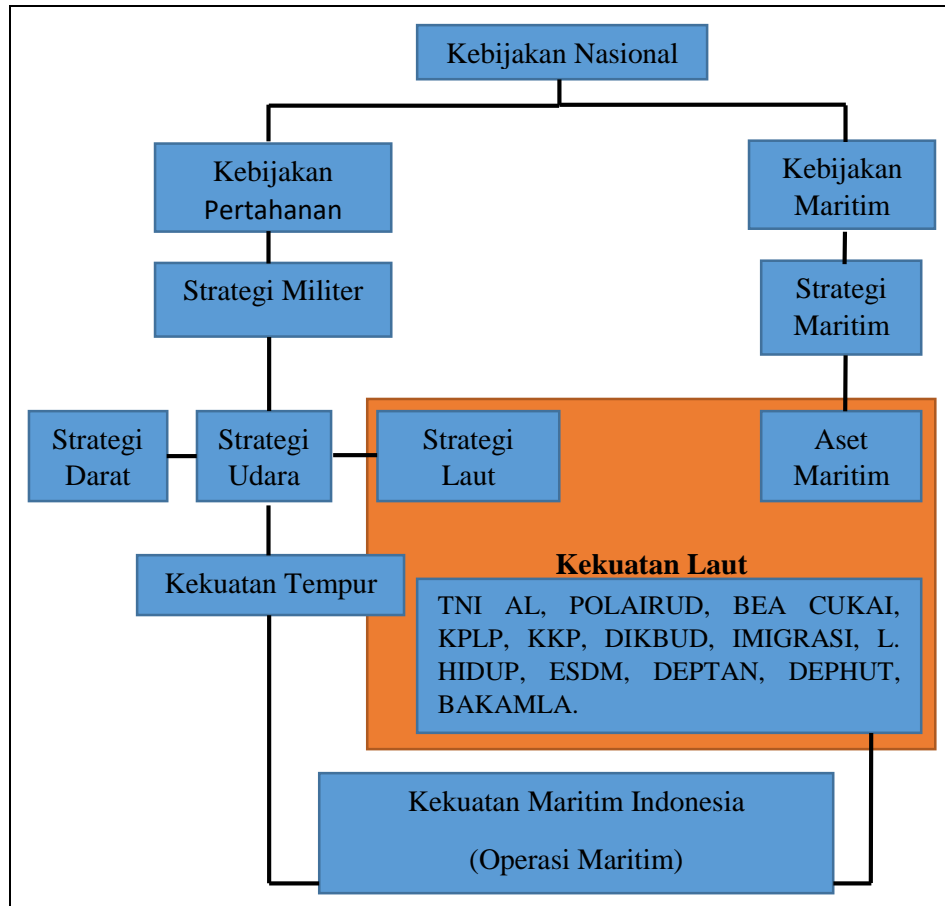
Dengan lima pilar tersebut, kebijakan poros maritim dunia ini terus diimplementasikan melalui berbagai rancangan yang telah dibuat. Indonesia dengan visi poros maritim dunia tidak terlepas dari tantangan dan permasalahan dalam mewujudkannya. Indonesia selalu dihadapkan pada lingkungan yang strategis dengan semakin kompleksnya ancaman yang datang, baik itu ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional (Laksmiana, Gindarsah, & Mantong, 2018, p. 5).

Indonesia sebagai negara kepulauan besar tidak dapat memungkiri lagi bahwa laut telah memiliki arti penting bagi Indonesia. Sehingga dengan adanya arti penting laut bagi Indonesia, maka keamanan maritim menjadi sebuah keharusan untuk dijaga. Oleh karena itu, kepentingan nasional Indonesia menjadi yang paling penting. Selain itu, dengan melalui kebijakan luar negeri, maka dapat menjaga stabilitas dan integritas wilayah Indonesia dari ancaman yang ada dan yang akan datang. Posisi Indonesia yang berada di Asia Pasifik dan adanya dinamika keamanan maritim di kawasan ini telah membuat Indonesia harus melibatkan diri. Di mana suatu strategi dibuat dengan perencanaan untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang dimiliki (Salim, 2015, p. 4). Kebijakan poros maritim dunia ini merupakan bentuk dari kepentingan nasional Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, Indonesia pada

masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memiliki strategi dalam menjalankan kebijakan ini. Di mana strategi pemerintah Indonesia yaitu:

2.3.1 Strategi internal

Dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah Indonesia memiliki strategi internal. Di mana strategi ini dibuat sebagai pendekatan yang dilakukan negara secara menyeluruh terhadap wilayah laut dan sekitarnya agar melalui kegiatan maritimnya mampu memaksimalkan laut dan dapat mencapai kepentingan nasional (Salim, 2015, p. 7). Sehingga dalam memanfaatkan laut, harus beriringan dengan adanya kebijakan pertahanan agar strategi kepentingan nasional sebagai poros maritim dunia dapat tercapai. Berikut merupakan strategi Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya melalui kebijakan maritim dan pertahanan, yaitu:



Gambar 2.3.1.1. Indonesia's maritime strategy model (Salim, 2015, p. 8).

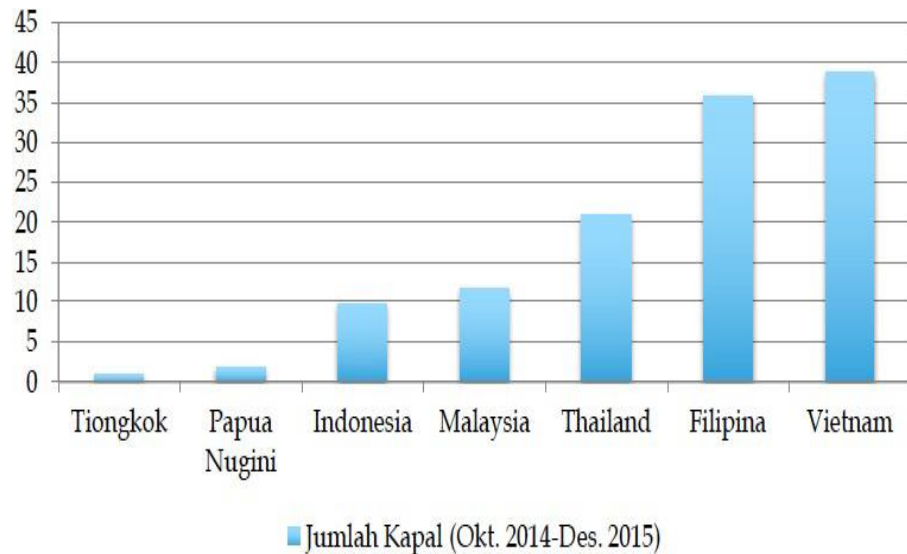
Berdasarkan gambar di atas, strategi maritim menjadi sebagai sebuah pendekatan yang menyeluruh terhadap wilayah laut di sekitarnya karena kegiatan maritim mencakup seluruh aspek agar dapat memaksimalkan kepentingan yang dimiliki (Salim, 2015, p. 7). Sehingga strategi ini dapat memainkan peran penting terhadap dinamika keamanan maritim yang terjadi di Asia Pasifik. Di mana yang dapat memainkan perannya yaitu militer Indonesia dalam melawan kekuatan luar yang akan mengancam kepentingan Indonesia di Asia Pasifik. Dengan kata lain, militer Indonesia, khususnya Angkatan Laut memiliki keterlibatan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di Asia Pasifik. Selain itu, strategi militer dari darat dan udara juga memiliki peran

masing-masing dalam menjalankan kebijakan Indonesia di Asia Pasifik. Dengan begitu, seluruh elemen seperti yang ada pada gambar di atas bersama dalam satu komponen untuk menjalankan kebijakan nasional yang dimiliki pemerintah Indonesia. Di mana seluruh elemen tersebut memiliki tugas masing-masing sesuai kemampuan yang dimiliki. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut dapat digunakan strategi yang dimiliki untuk mencapai kepentingan dari kebijakan nasional pemerintah Indonesia.

Strategi internal ini dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan memanfaatkan kekuatan pertahanan dalam pengelolaan maritim. Sebab dinamika keamanan maritim yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap kondisi keamanan maritim Indonesia. Namun, pada dasarnya, dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat lebih memungkinkan jika situasi di Asia Pasifik lebih kondusif. Akan tetapi, tidak lupa situasi domestik yang kondusif juga akan memberikan peluang dan pengaruh yang sangat besar.

Indonesia dalam mewujudkan visi poros maritim dunia dan mencegah ancaman keamanan maritim di Asia Pasifik salah satunya yaitu dapat dilihat ketika penenggalaman dan peledakan kapal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap IIU *fishing* secara illegal. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan dari pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan maritim untuk mewujudkan poros maritim dunia demi tercapainya kepentingan nasional. Berikut merupakan data dari reaksi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi

permasalahan IUU *fishing* secara illegal di perairan Indonesia, yaitu dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.3.1.2. Jumlah Kapal Asing Yang Ditenggelamkan (Laksmiana, Gindarsah, & Mantong, 2018, p. 10).

Implementasi dari kebijakan yang dimiliki Indonesia tentunya dilakukan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan melalui kebijakan luar negerinya, keterlibatan Indonesia terhadap dinamika keamanan maritim yang terjadi di Asia Pasifik begitu penting. Sehingga kebijakan poros maritim dunia ini memerlukan aspek pertahanan dan keamanan (Hidayat & Ridwan, 2017, p. 114).

Di sisi lain, dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan sering dihadapkan pada dinamika keamanan maritim yang terjadi di Asia Pasifik. Adanya ancaman yang datang tersebut seperti salah satunya yaitu insiden Natuna yang mana pemerintah Indonesia memberikan respon yang keras kepada Tiongkok (Suryowati, 2016). Di mana pemerintah

Indonesia merespon bahwa pemerintah Tiongkok harus bijaksana dengan tidak mengintervensi upaya penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan harus menghormati Indonesia yang sedang dengan gencar-gencarnya memerangi IUU *Fishing*. Pemerintah Indonesia merespon dengan memberikan protes keras dan nota protes kepada pemerintah Tiongkok melalui Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Republika, RI-Cina Pascainsiden Natuna, 2016). Selain itu, pemerintah Indonesia juga terus meningkatkan aktivitas pertahanan dan keamanan di wilayah Natuna dengan menempatkan TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara (Kuwado, 2016).

Oleh karena itu, aspek pertahanan dan keamanan menjadi sangat diperlukan dalam mengatasi berbagai dinamika keamanan maritim yang terjadi di Asia Pasifik. Selain itu, Indonesia juga memiliki 13 instansi pemerintahan untuk mendukung dalam menjaga wilayah perairan (Kadar, 2015, hal. 438). Di mana 13 instansi tersebut yaitu Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Laut, Polisi Air, Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Ditjen Bea Cukai, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Ditjen Imigrasi, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Badan Keamanan Laut.

Dengan adanya 13 instansi pemerintahan tersebut dapat secara bersama-sama dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan Indonesia.

Di mana dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo mencoba merubah instansi-instansi tersebut yang sebelumnya *multi agent* menjadi *single agent* yang bertugas sesuai bidang masing-masing dengan saling berinteraksi secara bersama-sama untuk mencapai kepentingan dari kebijakan yang dimiliki (Kadar, 2015, hal. 431). Misalnya Kementerian Perhubungan bertugas menyelesaikan berbagai hambatan pada perjalanan melalui laut, sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bertugas mengamankan dan mengelola kekayaan laut dan perikanan dengan saling berkoordinasi antara satu sama lain, begitu juga instansi-instansi lainnya yang memiliki tugas masing-masing (Kadar, 2015, hal. 432-433). Sebab kebijakan poros maritim dunia ini dijalankan dengan memanfaatkan instansi-instansi yang memiliki tugas masing-masing dengan saling berkoordinasi dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan Indonesia. Sehingga kebijakan poros maritim dunia dijalankan sesuai strategi yang dimiliki.

2.3.2 Strategi eksternal

Berbagai dinamika keamanan maritim di Asia Pasifik dapat berdampak terhadap kebijakan poros maritim dunia. Adanya aktivitas yang menyebabkan ancaman keamanan maritim di Asia Pasifik menjadikan Indonesia harus dapat memelihara dan menjaga stabilitas keamanan maritim kawasan ini. Di mana potensi-potensi ketegangan bahkan konflik yang terjadi di kawasan ini membuat stabilitas keamanan maritimnya menjadi terganggu. Sehingga dengan melalui politik luar negerinya, Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo

terus melakukan berbagai usaha dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di Asia pasifik.

Maka dengan itu, Indonesia dalam menanggapi berbagai dinamika yang terjadi di Asia Pasifik harus dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan ini. Indonesia memiliki peran penting untuk terlibat dalam isu-isu keamanan dan perdamaian dengan menggunakan pendekatan dan strategi yang dimiliki. Di mana melalui kebijakan poros maritim dunia ini, salah satunya yaitu Indonesia melakukan kerja sama angkatan laut dengan Amerika Serikat dalam menangani berbagai masalah keamanan maritim (Neary, 2014). Kerja sama ini merupakan bagian dari kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat di sektor maritim, khususnya pada keamanan maritim. Sehingga kerja sama keamanan maritim yang dilakukan oleh Indonesia dengan Amerika Serikat merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia terus menerapkan politik luar negerinya demi tercapai kepentingan nasional. Oleh karena itu, dengan kerja sama ini dapat dikatakan menjadi kerja sama yang saling menguntungkan karena memiliki banyak pertimbangan yang dapat memberikan dampak positif bagi kedua negara.

Dengan begitu, melalui kerja sama akan membuat segala potensi yang mengganggu stabilitas keamanan maritim di Asia Pasifik dapat diarahkan menuju tindakan-tindakan yang tidak memicu ketegangan bahkan konflik. Sehingga dengan kemampuan kekuatan militer, khususnya angkatan laut, dan kemampuan kerja sama dengan angkatan laut negara lain agar mampu mencegah kejahatan yang ada di laut itu

sendiri (Laksamana TNI (Purn) Dr. Marsetio, 2018, p. 142). Sehingga kebijakan yang digunakan untuk mencapai kepentingan Indonesia di Asia Pasifik yaitu dengan melalui kerja sama keamanan maritim dengan Amerika Serikat. Kemudian kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat ini terus berlanjut karena kedua negara ini sama-sama memiliki kepentingan di Asia Pasifik. Dalam kerangka kerja sama keamanan maritim ini, Indonesia dengan Amerika Serikat bekerja sama pada bidang yaitu sebagai berikut:

1. Pertahanan dan keamanan

Pertahanan dan keamanan suatu negara merupakan bagian yang penting dalam memegang peranan untuk mencapai kepentingan yang dimiliki. Sebab keamanan suatu negara diciptakan oleh kekuatan pertahanan yang dimiliki. Di mana keamanan suatu negara salah satunya didukung oleh keamanan maritim di perairan territorial dan regional (Putra A. R., 2017). Sehingga dalam hal ini, Indonesia dan Amerika Serikat telah menjadi mitra yang strategis dalam kerja sama di sektor maritim, khususnya keamanan maritim.

Di sisi lain, Amerika Serikat juga memiliki kemitraan strategis dengan negara-negara Asia Pasifik melalui kerja sama di sektor pertahanan dan keamanan. Sehingga posisi Indonesia kini telah dikelilingi oleh mitra atau aliansi Amerika Serikat di Asia Pasifik berupa pangkalan militer (Ferida, 2016). Oleh karena itu, Indonesia harus tetap memelihara hubungan kerja sama dengan Amerika Serikat

agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar mengingat posisi geografis Indonesia yang sangat strategis di Asia Pasifik. Di mana dalam kerja sama keamanan maritim ini, Indonesia dan Amerika Serikat terus melakukan hubungan kerja sama yang intens pada bidang pertahanan dan keamanan. Sebab kedua negara ini sepakat dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di Asia Pasifik. Oleh karena itu, kedua negara ini terus melakukan peningkatan kerja sama di bidang pertahanan yang termasuk dalam kerja sama di sektor keamanan maritim (DetikNews, 2015). Berikut ini merupakan bentuk peningkatan kerja sama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat terkait keamanan maritim, yaitu sebagai berikut:

- a. Latihan bersama kemiliteran antara Indonesia dan Amerika Serikat yang merupakan bagian dari latihan *Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT)* 2015 di Pusat Latihan Tempur Korps Marinir Baluran, Karangtekok, Situbondo, Jawa Timur (JakartaGreater, 2015).
- b. Latihan bersama kemiliteran antara Indonesia dan Amerika Serikat yang merupakan bagian dari latihan *Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT)* 2016 di Pusat Latihan Tempur Korps Marinir Baluran, Karangtekok, Situbondo, Jawa Timur (Farmita, 2016). Di mana latihan ini merupakan latihan antara TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut Amerika Serikat.

- c. Latihan bersama kemiliteran antara Indonesia dan Amerika Serikat yang merupakan bagian dari latihan *Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) 2017* di Surabaya dan Banyuwangi (Ziyadi, 2017). Di mana dalam latihan tersebut diikuti oleh TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terdiri dari *United States Navy* dan *United States Marine Corps*.
- d. Adanya kunjungan dari kapal USNS *Millinocket* dan USNS *Fall River* yang merupakan bagian dari CARAT 2017 yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dengan *US Marine* (Pelindo, 2017).
- e. Kerja sama antara kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam *Framework Arrangement on Cooperative Activities in the field of Defence between Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and Department of Defence of the United States of America* (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, 2015, pp. 82-83).
- f. Pada tanggal 16 September 2015, Indonesia dan Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian kerja sama terkait keselamatan nuklir (KBRI/PTRI Wina, 2015).

Baik Indonesia maupun Amerika Serikat juga terus berkerja sama dalam membangun kekuatan pertahanan dan keamanan militernya. Kerja sama pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh

kedua negara ini untuk mengatasi permasalahan seperti terorisme, - *illegal fishing*, sengketa perbatasan, perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, dan perdagangan manusia yang telah menjadi isu penting di Asia Pasifik. Sehingga Kerja sama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat terus mengalami penguatan karena menghadapi berbagai ancaman keamanan (Ashari, 2017). Sebab kekuatan pertahanan dan keamanan militer merupakan bagian yang penting dalam menjaga stabilitas keamanan maritim, baik di tingkat nasional kedua negara maupun di tingkat Asia Pasifik.

2. Keamanan laut dan keamanan pelabuhan.

Dalam kerja sama keamanan laut, Indonesia dengan Amerika Serikat berkeja sama dalam memerangi terorisme, *illegal fishing*, sengketa Laut Tiongkok Selatan, pembajakan kapal, dan hukum internasional mengenai kelautan. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan dalam pertemuannya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti, mengatakan bahwa perlu menekankan pentingnya kerja sama kedua negara ini dalam menjaga sumber daya, keamanan, dan keselamatan laut (Indana, 2017).

Di sisi lain, dalam memerangi *illegal fishing* dan menangani hukum internasional mengenai kelautan, pemerintah Amerika Serikat memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia dalam upaya penegakan hukum *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2016). Sehingga

dukungan ini menjadi upaya untuk bisa memberikan hal-hal yang positif bagi pemerintah Indonesia dalam memberantas IUU *Fishing*. Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan dukungan melalui Proyek Indonesia *Marine* dan *Climate Support* (IMACS) dan Proyek *Marine Protected Areas Governance* (MPAG) (Wicaksono, 2014). Sehingga kedua negara ini saling mendukung dan memandang pentingnya pemanfaatan potensi sumber daya kelautan, pengelolaan perikanan, dan peningkatan kapasitas untuk mencegah praktek IUU *Fishing* demi masa depan kedua negara.

Kemudian kerja sama keamanan maritim yang dilakukan oleh Indonesia dengan Amerika Serikat juga berkerja sama di bidang keamanan pelabuhan. Sebab di bidang ini juga menjadi bagian penting dalam menciptakan keamanan maritim, baik di perairan teritorial kedua negara maupun di Asia Pasifik. Kerja sama di bidang keamanan pelabuhan menjadi salah satu bagian penting kedua negara ini. Sehingga Indonesia dengan Amerika Serikat dalam kerja sama ini terus melakukan peningkatan ke arah yang lebih baik. Di mana bentuk peningkatan kerja sama oleh kedua negara ini yaitu:

- a. Departemen Luar negeri Amerika Serikat memberikan pelatihan kepada petugas penjaga pantai Indonesia melalui *U.S Coast Guard Program* dan *Export Control and Related Border Security Program* (U.S Embassy Jakarta, Memperkuat Keamanan Maritim melalui Pelatihan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Indonesia-Amerika Serikat, 2014).

- b. Dalam bidang kerja sama keamanan pelabuhan ini dibuktikan dengan adanya kunjungan mengenai penyelenggaraan *Technical Review Strategic Trade Control (STC) System* di Indonesia (Bcbatams, 2015). Adanya kunjungan tersebut dilakukan oleh pihak *Export Control and Related Border Security (EXBS)* di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Batam. Sehingga kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat ini untuk meningkatkan kapasitas standar keamanan kapal dan pelabuhan internasional, serta bisa mencegah ancaman keamanan pada transportasi laut.

Dengan demikian, bagi Indonesia, dengan terus membangun hubungan kerja sama keamanan maritim dengan Amerika Serikat di Asia Pasifik dapat membantu Indonesia untuk terus membangun kekuatan militernya. Sebab dilihat dari perkembangan Asia Pasifik dewasa ini, dinamika keamanan kawasan ini telah menjadi ancaman bagi Indonesia. Oleh karena itu, baik Indonesia maupun Amerika Serikat terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di Asia Pasifik. Sehingga kedua negara ini dapat mewujudkan kepentingan yang dimiliki masing-masing. Namun di sisi lain, tidak lupa Indonesia dalam politik luar negerinya tetap menganut politik luar negeri bebas aktif. Sehingga kerja sama keamanan maritim yang dilakukan oleh Indonesia dengan di Asia Pasifik merupakan bagian dari strategi dalam mengimbangi mitra kerja sama dengan negara lain. Hal ini mengingat Indonesia juga melakukan berbagai kerja sama dengan negara lain. Dengan begitu tidak mungkin bagi Indonesia untuk memihak ke salah satu pihak.